BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Suatu Pemerintah Daerah adalah sebagai bagian dari pada sistem pemerintahan Negara yang seharusnya perlu diketahui oleh setiap warga negara. Karena dengan demikian setiap warga negara akan mengetahui dimana kedudukannya, apa hak dan kewajibannya didalam kehidupan bernegara.

Sebagai fasilitas berlangsungnya pemerintahan di daerah maka Kantor Kabupaten Daerah Tingkat II mempunyai tujuan dan fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat menuntut adanya suatu wadah kegiatan pelayanan yang efektif. Untuk mencapai efektifitas kerja yang optimal diperlukan studi terhadap organisasi tata ruang kerja yang sesuai dengan kegiatan kerja, hubungan kegiatan kerja, sistem pelayanan, kebutuhan ruang, pola hubungan ruang dan kebutuhan besaran ruang. Dengan demikian diperlukan analisa untuk mengetahui keterkaitan antar bagian yang ada dalam Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II. Karena organisasi perkantoran cenderung berubah dengan cepat dan dalam berbagai situasi, maka perlu perhatian yang tanggap.

Dialam pembangunan dewasa ini segalanya telah terbangun secara cepat, hal yang paling menonjol terutama semakin pesatnya komunikasi budaya serta perkembangan-perkembangan tata kehidupan, dan berkaitan erat dengan tuntutan kebutuhan masyarakat juga semakin meningkat.

Dalam hal ini jajaran Pemerintah Daerah Tingkat II Ponorogo juga mengalami perubahan yaitu perubahan bagian, yang tadinya sebelas bagian menjadi empat belas bagian. Penambahan jumlah bagian ini berkaitan dengan adanya perubahan pola organisasi, perubahan tersebut dapat dilihat dari tolok ukur yang adan pada Pemerintah Daerah pada umumnya seperti, luas wilayah , jumlah penduduk, jumlah wilayah bawahan, jumlah pendapatan asli daerah.[1)].

Setelah diadakan evaluasi maka terdapat perubahan pola organisasi minimal menjadi pola organisasi maksimal, sehingga membutuhkan sarana dan prasarana guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Berkaitan dengan peningkatan pelayanan, baik untuk saat sekarang maupun masa mendatang dalam Kantor Pemerintah Daerah Tingkat II Ponorogo perlu adanya penataan, guna memudahkan dalam pengawasan dan koordinasi serta untuk meningkatkan efektifitas kerja baik

1). Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 1992.

keluar maupun kedalam. Penataan dimaksudkan untuk mengungkapkan kesatuan (unity) dan memberikan citra terhadap bangunan perkantoran yang berwibawa. Karena sebagai bangunan perkantoran kurang mendukung dalam penampilan sebagai kantor pemerintahan, selain itu untuk memberikan pelayanan yang efektif untuk masa mendatang.

B. PERMASALAHAN

1. Masalah Umum

   Bagaimana meningkatkan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan pada masyarakat menyangkut segala fasilitas dan kelengkapanya.

2. Masalah Khusus

   - Bagaimana menata suatu komplek perkantoran Pemerintah Daerah Tingkat II Ponoroga yang sesuai dengan tuntutan dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
   - Bagaimana menciptakan bentuk fisik bangunan Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Ponorogo yang mencerminkan satu kesatuan yang monumental dan berwibawa.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan : Memembuat wadah kegiatan administrasi Kantor

Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo yang mencerminkan hirarki jabatan seperti pada struktur organisasi pada Pemerintahan Daerah Ponorogo.

Sasaran : Pendekatan kegiatan kerja yang ada, hubungan kegiatan kerja, sistem pelayanan, kebutuhan ruang, pola hubungan ruang dan kebutuhan besaran ruang.

D. LINGKUP PEMBAHASAN

Lingkup pembahasan dibatasi pada bidang arsitektur saja. Disiplin-disiplin ilmu lain akan dipakai sejauh dapat menunjang pembahasan.

E. METODE PEMBAHASAN

a. Analisa dan Sintesa

- Tahap pengungkapan masalah melalui pengumpulan data lewat observasi secara langsung, wawancara dan studi literatur.
- Struktur data disusun dengan menjaring/mengidentifikasikan atas permasalahan yang dianalisa disamping didukung teori, juga persyaratan dan fungsi serta peranan yang dianggap dapat dijadikan tolok ukur.
- Kondisi dan potensi Kabupaten itu sendiri yang

dipakai sebagai pertimbangan yang menentukan.

b. Evaluasi

Pendekatan dan pemecahan masalah dilakukan dengan melihat kondisi yang ada pada saat sekarang.

Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah perhitungan-perhitungan serta visualisasi untuk menggambarkan bentuk-bentuk pemecahan yang optimal.

c. Induksi

Melihat suatu data/permasalahan pada kondisi tertentu sebagai indikator dalam memperkirakan/menentukan macam keadaanpada kondisi yang berbeda.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

1. Pendahuluan mengungkapkan latar belakang, permasalahan serta apa yang akan dipecahkan dalam kasus ini.
2. Tinjauan terhadap Pemerintah Daerah Tingkat II berisi mengenai gambaran umum kegiatan kerja pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat dan fasilitas yang dibutuhkan.
3. Mengemukakan tinjauan kota Kabupaten Ponorogo yang menyangkut diskripsi wilayah, kondisi kota, ungkapan bentuk arsitektural, serta kondisi Kantor Pemda Ponorogo
4. Mengemukakan analisis Kantor Pemda Kabupaten Ponorogo kaitannya dengan efektifitas kerja dan pelayanan untuk menuju pendekatan konsep perencanaan dan perancangan.

5. Mengemukakan pendekatan konsep dasar perencanaan dan perancangan.
6. Mengemukakan konsep perancangan Kantor Kabupatan Ponorogo.




ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA